

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI TEGAL**

MARET TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Tegal
Pada Hari Kamis, 31 Maret 2020

Ketua Pengadilan Negeri Tegal,

Ketua Tim Survei,

ttd

ttd

Djoni Witanto, S.H., M.H.
NIP. 19681212 199212 1 001

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.
NIP. 197901022003121001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tegal mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Tegal, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Tegal dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Tegal.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tegal, 31 Maret 2020

Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum	1
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	3
METODOLOGI.....	3
2.1. Metode Penelitian.....	3
2.2. Populasi Dan Sampel	3
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	3
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	3
2.5. Teknik Analisis Data.....	3
2.6. Tahapan pelaksanaan	4
BAB III	6
INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	6
3.1. Profil responden.....	6
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	8
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	14
BAB IV.....	17
PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner
 - b. Bagian dari kuesioner/pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah responden
 - b. Lokasi dan waktu pengumpulan data
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 (enam) bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Tegal. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Tegal.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 (seratus) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan

skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1.
Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas

Tabel 1
Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

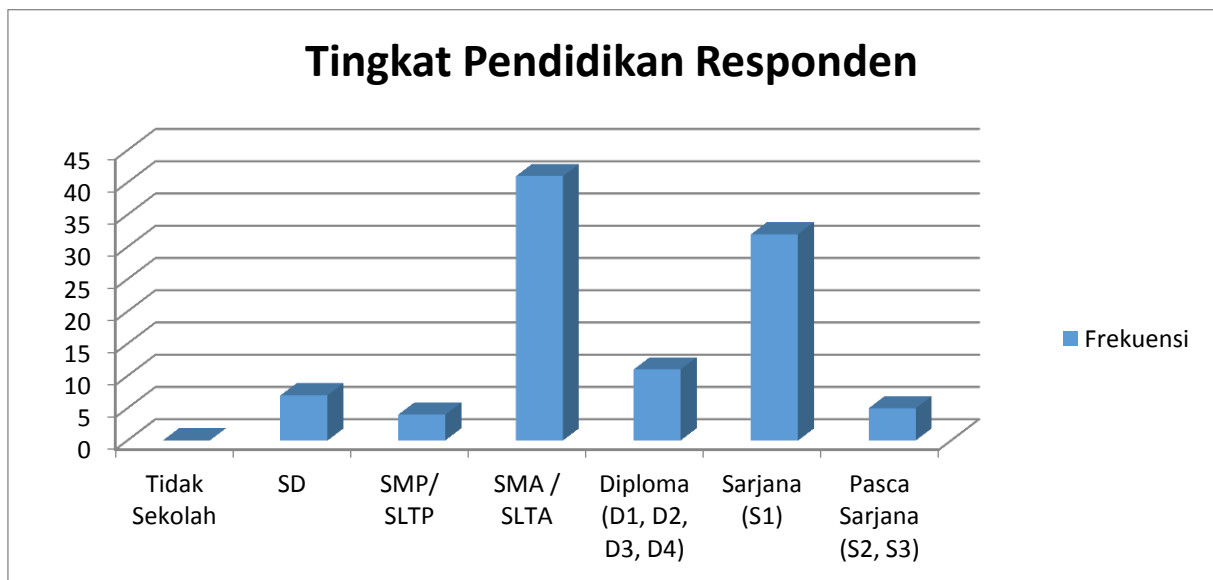
3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan di Pengadilan Negeri Tegal mayoritas memiliki latar **Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)**.

Tabel 3.
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak Sekolah	0	0,00
2.	SD	7	7,00
3.	SMP/ SLTP	4	4,00
4.	SMA / SLTA	41	41,00
5.	Diploma (D1, D2, D3, D4)	11	11,00
6.	Sarjana (S1)	32	32,00
7.	Pasca Sarjana (S2, S3)	5	5,00
Jumlah		100	100



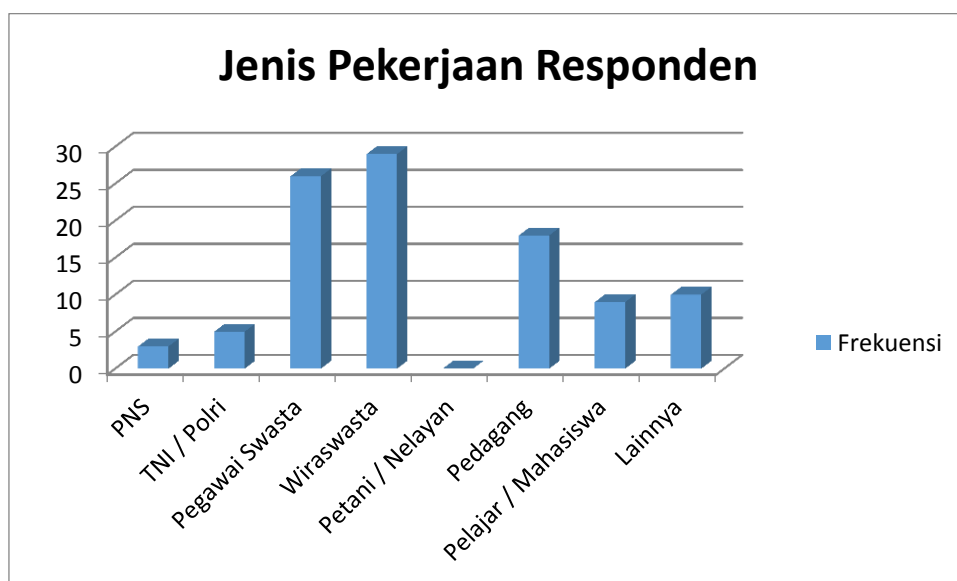
Gambar 2. Tingkat Pendidikan Responden

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, pengguna layanan Pengadilan Negeri Tegal kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta sebesar 29% dan Pegawai Swasta sebesar 26%.

Tabel 4.
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS	3	3,00
2.	TNI / Polri	5	5,00
3.	Pegawai Swasta	26	26,00
4.	Wiraswasta	29	29,00
5.	Petani / Nelayan	0	0,00
6.	Pedagang	18	18,00
7.	Pelajar / Mahasiswa	9	9,00
8.	Lainnya	10	10,00
Jumlah		100	100



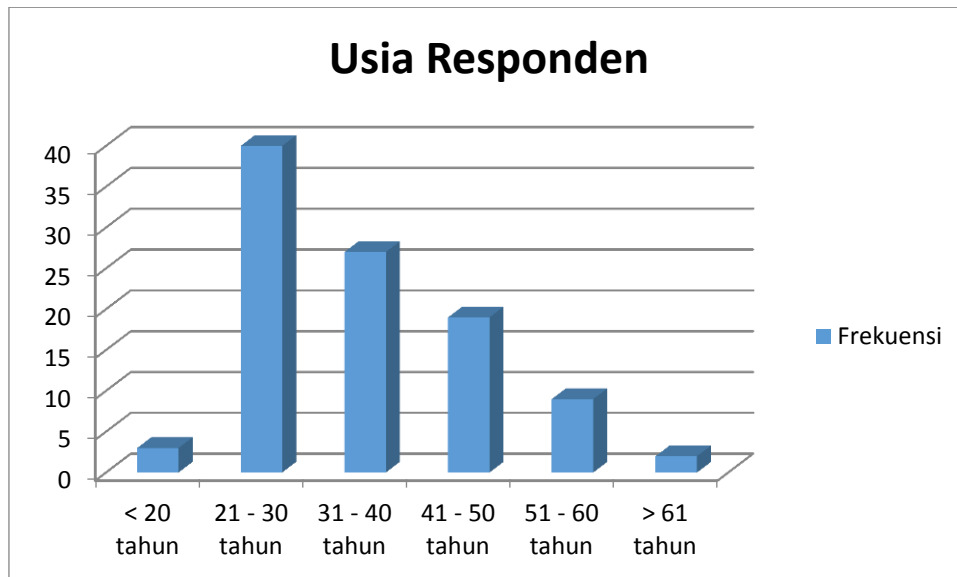
Gambar 3. Jenis Pekerjaan Responden

3.1.3. Kelompok usia responden

Dari sisi usia responden, pengguna layanan Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 21 tahun s/d 30 tahun sebesar 40,00%.

Tabel 5.
Usia Responden

No.	Usia	Frekuensi	
		F	%
1.	< 20 tahun	3	3,00
2.	21 - 30 tahun	40	40,00
3.	31 - 40 tahun	27	27,00
4.	41 - 50 tahun	19	19,00
5.	51 - 60 tahun	9	9,00
6.	> 61 tahun	2	2,00
Jumlah		100	100



Gambar 4. Usia Responden

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

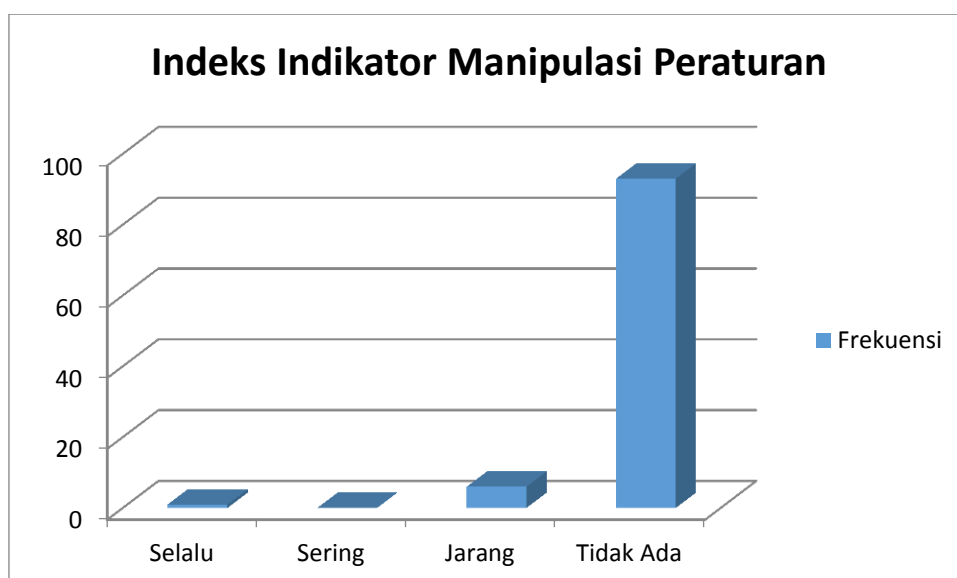
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,91**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 6.
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	1	1,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	6	6,00
4.	Tidak Ada	4	93	93,00
Jumlah			100	100



Gambar 5. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

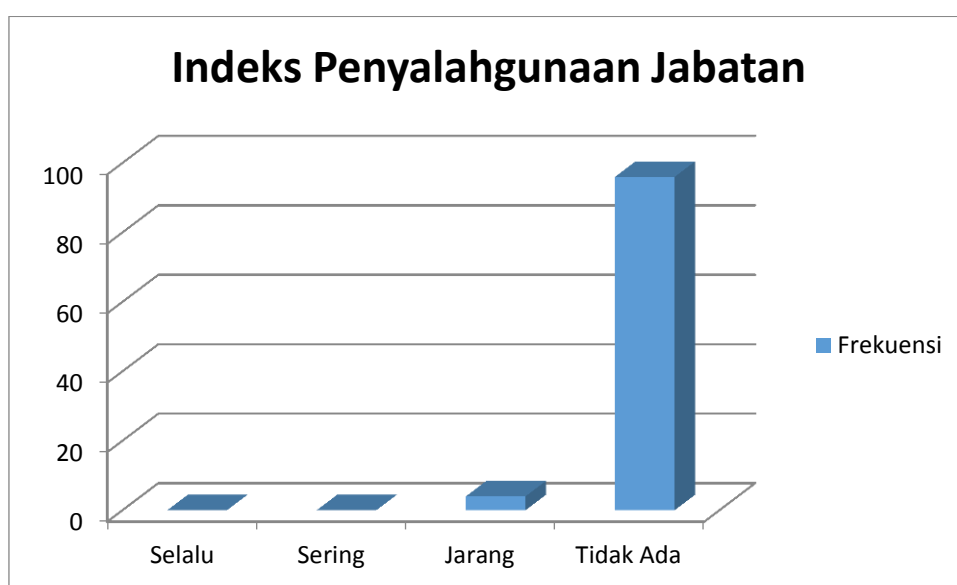
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,96**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 7.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	4	4,00
4.	Tidak Ada	4	96	96,00
Jumlah			100	100



Gambar 6. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

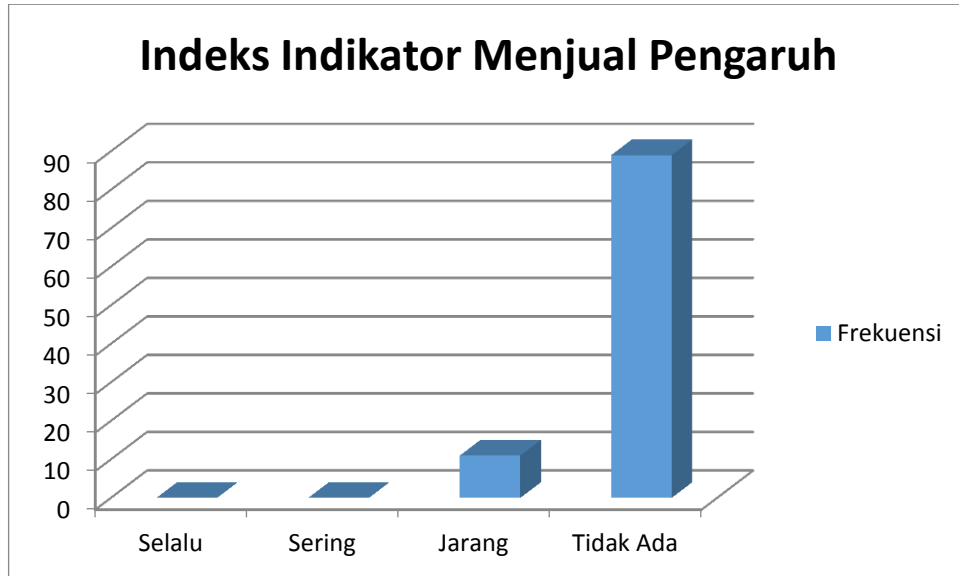
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,89**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 8.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	11	11,00
4.	Tidak Ada	4	89	89,00
Jumlah			100	100



Gambar 7. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

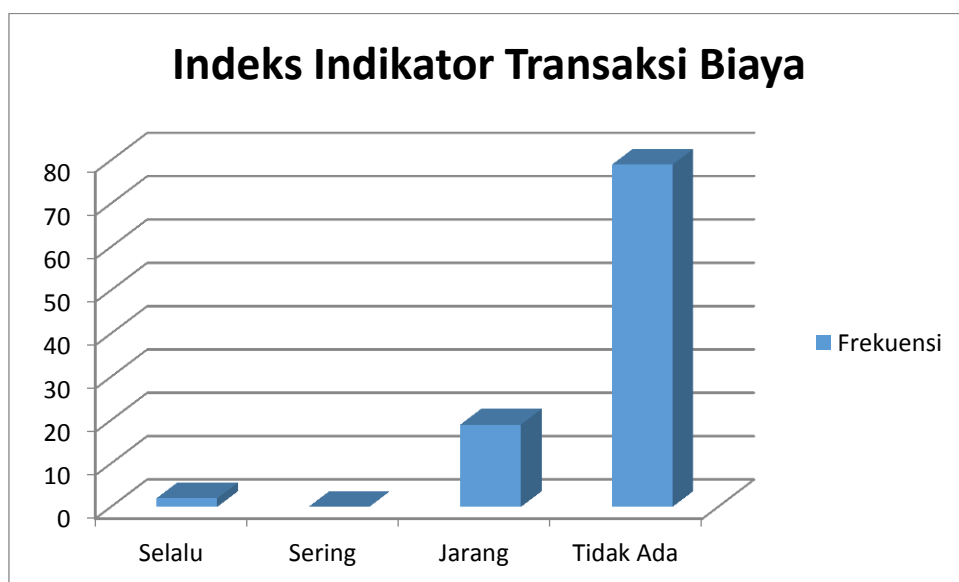
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,75**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	2	2,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	19	19,00
4.	Tidak Ada	4	79	79,00
Jumlah			100	100



Gambar 8. Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

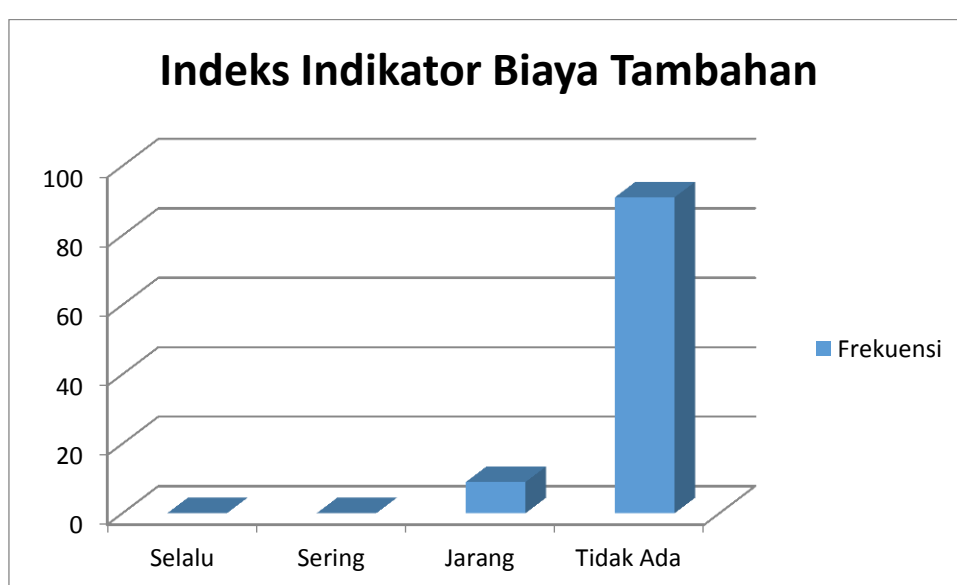
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,91**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 10.
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	9	9,00
4.	Tidak Ada	4	91	91,00
Jumlah			100	100



Gambar 9. Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

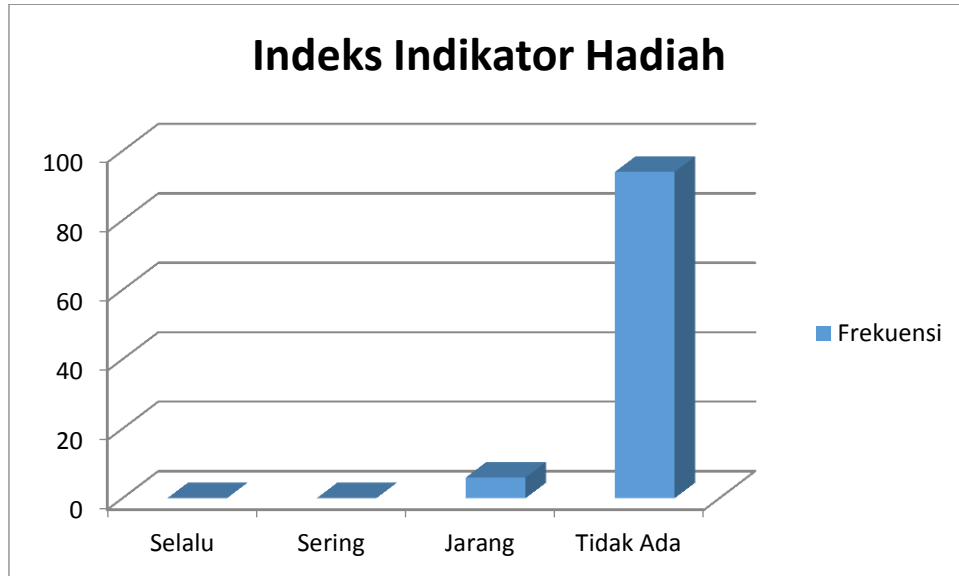
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3,94**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 11.
Indeks pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	6	6,00
4.	Tidak Ada	4	94	94,00
Jumlah			100	100



Gambar 10. Indeks pada Indikator Hadiah

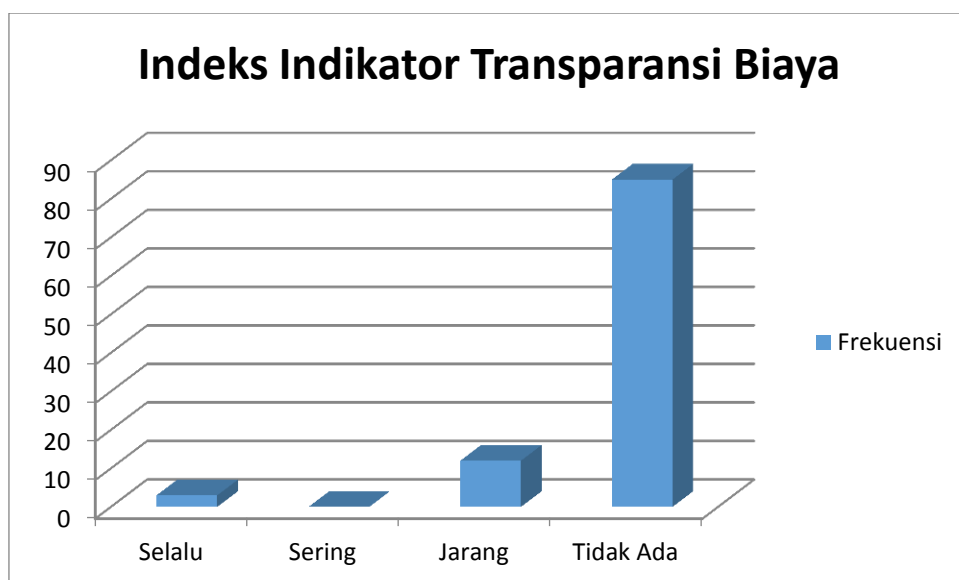
3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,79**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 12.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	3	3,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	12	12,00
4.	Tidak Ada	4	85	85,00
Jumlah			100	100



Gambar 11. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

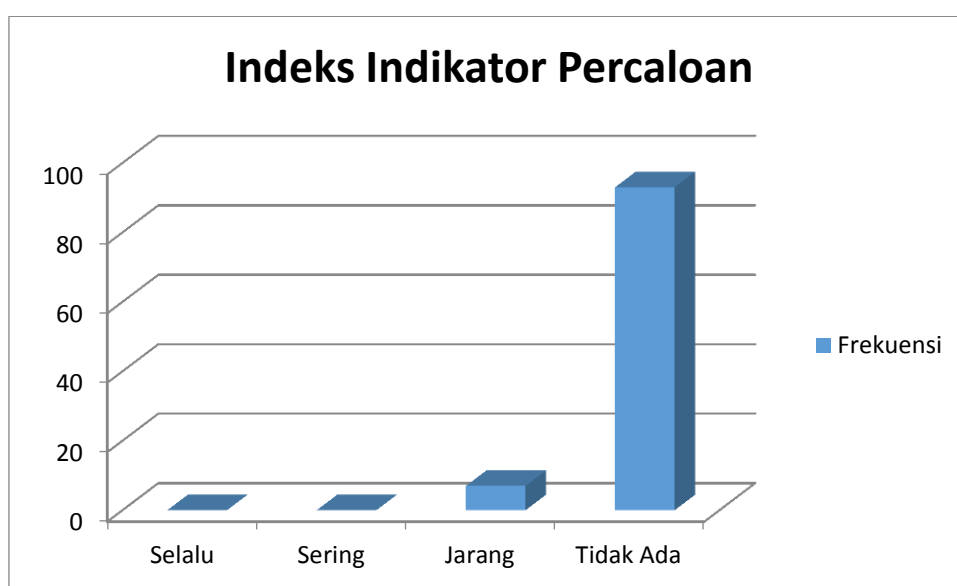
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,93**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 13.
Indeks pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	7	7,00
4.	Tidak Ada	4	93	93,00
Jumlah			100	100



Gambar 12. Indeks pada Indikator Percaloan

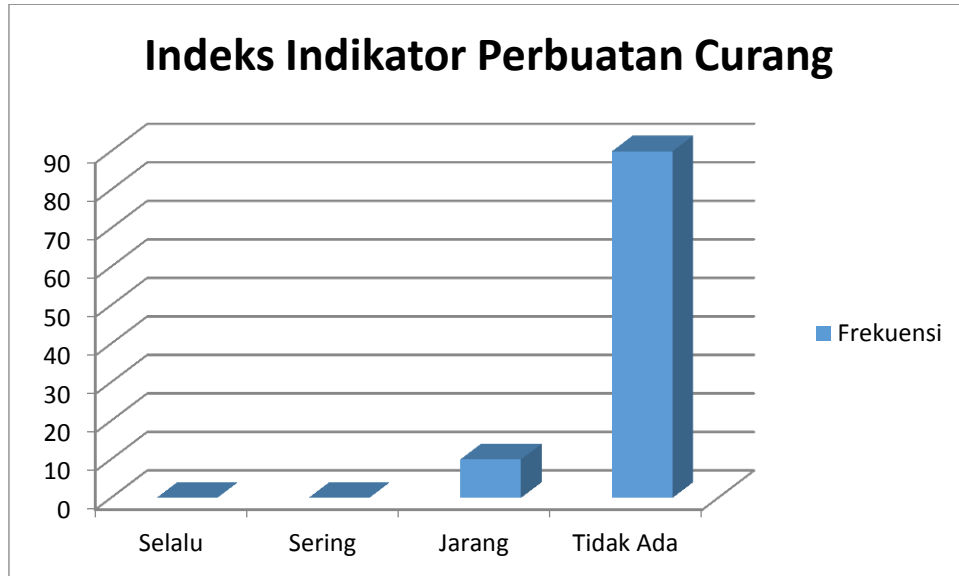
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks **3,90**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 14.
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	10	10,00
4.	Tidak Ada	4	90	90,00
Jumlah			100	100



Gambar 13. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

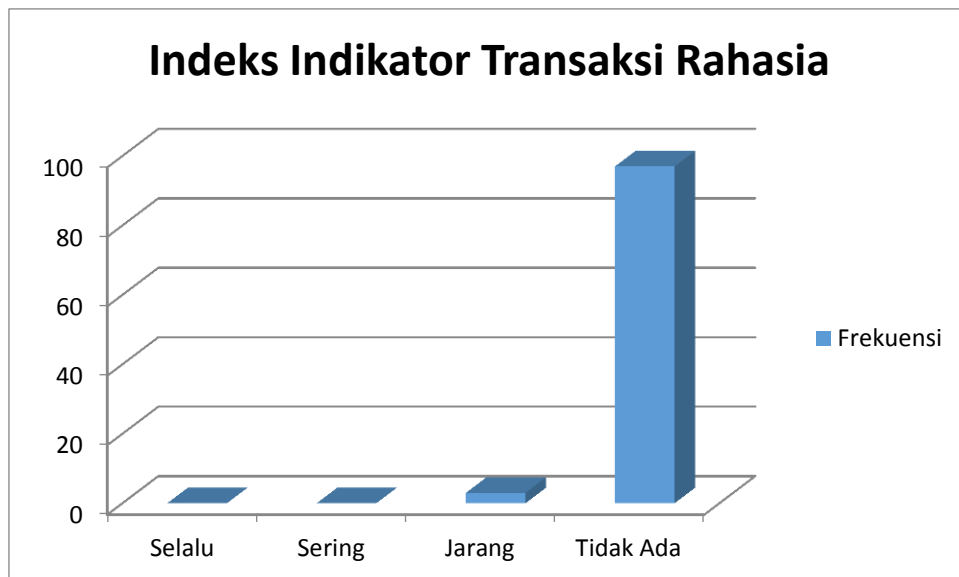
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Tegal **Bersih dari Korupsi**.

Tabel 15.
Indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	3	3,00
4.	Tidak Ada	4	97	97,00
Jumlah			100	100



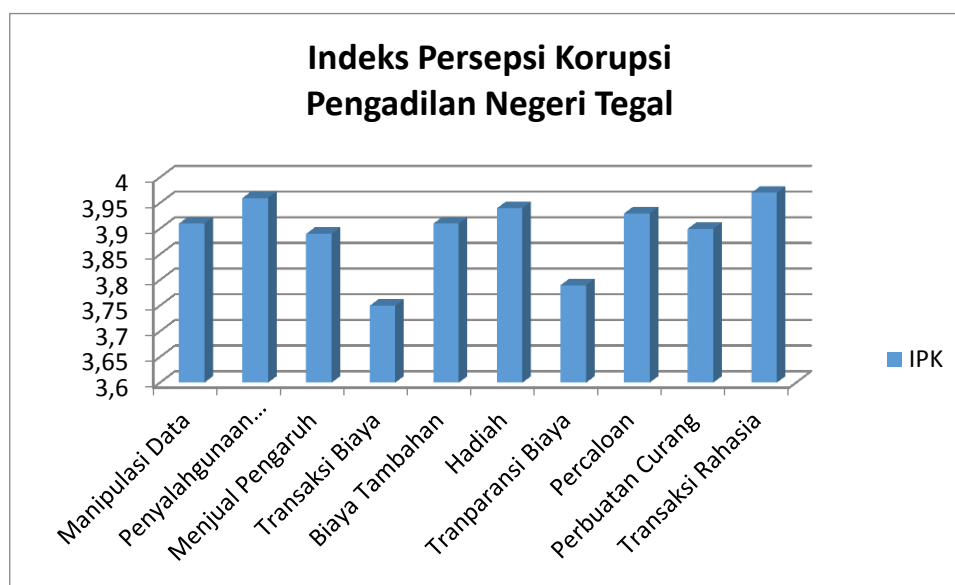
Gambar 14. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tegal sebesar **3,90**.

Tabel 16.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tegal

No.	Ruang Lingkup	IPK	IPK Tertimbang	%
1.	Manipulasi Data	3,91	0,39	9,97
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,96	0,40	10,10
3.	Menjual Pengaruh	3,89	0,39	10,03
4.	Transaksi Biaya	3,75	0,38	10,13
5.	Biaya Tambahan	3,91	0,39	9,97
6.	Hadiah	3,94	0,39	9,89
7.	Tranparansi Biaya	3,79	0,38	10,02
8.	Percaloan	3,93	0,39	9,92
9.	Perbuatan Curang	3,90	0,39	10
10.	Transaksi Rahasia	3,97	0,40	10,07
Jumlah		39,00	3,90	100



Gambar 15. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tegal

Indeks **3,90** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **81,26-100,00**.

Tabel 17.
Persepsi Korupsi
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tegal

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Tegal diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Tegal memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,90** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,91**.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,96**.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,89**.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,75**.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,91**.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,94**.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,79**.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,93**.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,90**.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,97**.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Tegal periode September 2019 sampai dengan Maret 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,26** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Transaksi Biaya** memiliki indeks **paling rendah** diantara indikator lainnya. Indikator **Transaksi Biaya** inilah yang ke depan menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pengadilan Negeri Tegal untuk diperbaiki.

LAMPIRAN